

# RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2020 - 2024



**PENGADILAN AGAMA KELAS IA YOGYAKARTA**  
Jl. Ipda Tut Harsono No.53 Yogyakarta  
Telp : 0274-552997, Fax : 0274-552998  
Website: <http://www.pa-yogyakarta.go.id>  
e-mail : [admin@pa-yogyakarta.net](mailto:admin@pa-yogyakarta.net)

**RENCANA STRATEGIS**  
**PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**  
**TAHUN 2020-2024**





## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur ke Hadirat Allah SWT, atas Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya, Pengadilan Agama Yogyakarta dapat menyelesaikan pembuatan dokumen Rencana Strategis, yang disebut Renstra Pengadilan Agama Yogyakarta 2020-2024. Renstra ini menguraikan tentang Tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dengan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun dari tahun 2020-2024.

Rencana Strategis disusun sesuai dengan Hasil Rekomendasi dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam pelaksanaan Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2011 dan Jaringan Peradilan di bawahnya dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementrian/ Lembaga (RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5

(lima) tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan matriks pendanaannya disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diperkirakan diterima Pengadilan Agama Yogyakarta.

Dengan tersusunnya rencana strategis ini, diharapkan menjadi pijakan sekaligus panduan dan acuan bagi seluruh aparatur Pengadilan Agama Yogyakarta memberikan pelayanan hukum dan keadilan kepada pencari keadilan, yang merupakan *core bussiness* lembaga ini serta adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Pengadilan Agama Yogyakarta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, renstra ini dimaksudkan untuk menyediakan dokumen bagi Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 yang lebih akuntabel.



## *Pengadilan Agama Yogyakarta*

Renstra Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2020-2024 telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangan, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan

prioritas dan kebijakan pimpinan Pengadilan Agama Yogyakarta. Semoga Renstra Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2020-2024 ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Agama Yogyakarta yaitu ***“Mewujudkan Pengadilan Agama Yogyakarta yang Agung”***.

Yogyakarta, Februari 2020  
Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta



Drs. H. DEDHY SUPRIADY, MA  
NIP. 19591105 198703 1 003



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
A. Kondisi Umum	2
B. Potensi dan Permasalahan	4
<b>BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS</b>	11
A. Visi dan Misi	12
B. Tujuan dan Sasaran Strategis	13
<b>BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI</b>	17
A. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung	19
B. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Yogyakarta	20
C. Kerangka Regulasi	21
D. Kerangka Kelembagaan	27
<b>BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN</b>	28
<b>BAB V PENUTUP</b>	29
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<i>Matrik Rencana Strategis Pengadilan Agama Yogyakarta 2020-2024</i>	34
<i>Matrik Pendanaan Tahun 2020-2024</i>	40



# BAB. I

## PENDAHULUAN

- KONDISI UMUM
- POTENSI DAN PERMASALAHAN



## A. KONDISI UMUM

Peran Pengadilan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, hasil utama yang diharapkan dalam penyelenggaraan peradilan adalah pelayanan public yang baik, sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kita sadari bahwa kondisi penyelenggaraan pelayanan public masih belum sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga Pengadilan Agama Yogyakarta wajib untuk : (a). mewujudkan system penyelenggaraan pelayanan publik yang layak; (b). menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (c). memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Agama Yogyakarta merupakan lingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai 5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Yogyakarta.

Rencana Strategis ini dijabarkan kedalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai dilaksanakan oleh Sumber Daya manusia yang kompeten ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Yogyakarta baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variable strategis.



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, telah memantapkan status peradilan agama sebagai lembaga peradilan yang utuh dan mandiri dengan ditandai mempunyai kewenangan untuk mengeksekusi putusannya sendiri.

Pengadilan Agama Yogyakarta mempunyai wilayah hukum sama dengan pemerintah daerah kota Yogyakarta, yaitu terdiri dari 14 kecamatan yang meliputi 45 kelurahan sebagai berikut:

No	Nama Kecamatan	:	Nama Kelurahan
1	Umbulharjo	:	Muja-Muju, Semaki, Tahunan, Warungboto, Pandean, Giwangan, Sorosutan
2	Kota Gede	:	Prenggan, Purbayan, Rejowinangun
3	Gondokusuman	:	Kotabaru, Terban, Klitren, Baciro, Demangan
4	Danurejan	:	Suryatmajan, Tegal Panggung, Bausasran
5	Pakualaman	:	Purwokinanti, Gunung Ketur
6	Mergangsan	:	Wirogunan, Brontokusuman, Keparakan
7	Kraton	:	Kadipaten, Patehan, Panembahan
8	Mantrijeron	:	Gedongkiwo, Suryodiningratan, Mantrijeron
9	Wirobrajan	:	Patang Puluhan, Wirobrajan, Pakuncen
10	Ngampilan	:	Ngampilan, Notoprajan
11	Gondomanan	:	Prawirodirjan, Ngupasan
12	Tegalrejo	:	Tegalrejo, Bener, Kricak, Karangwaru
13	Jetis	:	Gowongan, Cokrodiningratan, Bumijo
14	Gedongtengen	:	Sosromenduran, Pringgokusuman

Sedangkan Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2020 sejumlah 37 orang, ditambah 11 pegawai tidak tetap, terdiri dari :



1. Ketua	: 1 orang
2. Wakil Ketua	: 1 orang
3. Hakim	: 9 orang
4. Panitera	: 1 orang
5. Panitera Muda	: 3 orang
6. Panitera Pengganti	: 7 orang
7. Jurusita	: 3 orang
8. Jurusita Pengganti	: 4 orang
9. Sekretaris	: 1 orang
10. Kepala Sub Bagian	: 3 orang
11. Pelaksana/Staf	: 6 orang
12. Pegawai Tidak Tetap	: 11 orang

Akan tetapi jumlah SDM tersebut belum ideal di lingkungan Pengadilan Agama Kelas IA.

## B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Metode yang dipergunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Agama Yogyakarta adalah melalui analisis SWOT (strengths, weaknesses, opportunities dan threats). Dalam analisis ini kajian dasar yang diterapkan adalah melakukan identifikasi terhadap berbagai faktor-faktor kekuatan dan kelemahan internal yang dimiliki suatu organisasi serta faktor-faktor peluang dan ancaman eksternal yang mungkin dan sangat mungkin terjadi.

Implementasi metode SWOT juga memperhatikan faktor-faktor kunci keberhasilan yang ada melalui analisa secara konseptual, analitis, realistis dan rasional untuk mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien.

### a. Kekuatan (Strengths) :

Kekuatan Pengadilan Agama Yogyakarta mencakup hal – hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang – undangan sampai dengan hal – hal yang dikembangkan antara lain :



1. Dukungan Sistem berbasis Web/ Desktop (SIPP, 9 Aplikasi Unggulan Badilag)
2. Adanya Reformasi Birokrasi dan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM)
3. Adanya Standard Operasional Prosedur (SOP)
4. Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
6. Dukungan Sistem Peradilan berbasis elektronik (e-court)

### **b. Kelemahan ( Weaknesses ) :**

Kelemahan – kelemahan yang ada pada Pengadilan Agama Yogyakarta dapat dirinci dalam beberapa aspek :

1. Jumlah pegawai yang belum sesuai dengan jumlah standar kompetensi SDM bidang fungsional dan kesekretariatan
2. Kurangnya Kepedulian sebagian pegawai terhadap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) di Pengadilan Agama Yogyakarta
3. Belum maksimalnya komitmen sebagian pegawai terhadap Pembangunan Zona Integritas
4. Pelaksanaan Tupoksi yang belum maksimal
5. Pelaksanaan Kode Etik hakim, Panitera dan Jurusita/JSP yang belum maksimal
6. Pelaksanaan Job Description yang belum maksimal

### **c. Peluang (Opportunities)**

Peluang - peluang yang dimiliki Pengadilan Agama Yogyakarta dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan untuk mengadakan perbaikan adalah sebagai berikut :

1. Adanya Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
2. Adanya Website Pengadilan Agama Yogyakarta
3. Adanya Tunjangan Kinerja/ Remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja
4. Adanya penerapan e-court sampai dengan e-litigation



5. Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
6. Penggunaan Teknologi Informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi secara optimal

#### d. Tantangan (Threats)

Berikut adalah tantangan – tantangan di Pengadilan Agama Yogyakarta yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan :

1. Keterbatasan Anggaran DIPA
2. Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
3. Masih adanya pegawai belum peduli terhadap Tupoksinya
4. Hasil Kinerja yang kurang maksimal
5. Masih kurangnya evaluasi kinerja pegawai
6. Kurang pahamnya pegawai akan perkembangan program-program prioritas yang dicanangkan Badilag

Dengan implementasi metode SWOT diatas, dapat diambil pemetaan interaksi factor internal dan eksternal yang kemudian akan didapatkan beberapa rumusan strategi untuk mewujudkan tujuan Pengadilan Agama Yogyakarta. Adapun rumusan strategi tersebut adalah :

IFAS	STRENGTHS (S)	WEAKNESSES (W)
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dukungan Sistem berbasis Web/ Desktop (SIPP, 9 Aplikasi Unggulan Badilag)</li><li>2. Adanya Reformasi Birokrasi dan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM)</li><li>3. Adanya Standard Operasional Prosedur (SOP)</li><li>4. Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jumlah pegawai yang belum sesuai dengan jumlah standar kompetensi SDM bidang fungsional dan kesekretariatan</li><li>2. Kurangnya Kepedulian sebagian pegawai terhadap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) di Pengadilan Agama Yogyakarta</li><li>3. Belum maksimalnya komitmen sebagian pegawai terhadap Pembangunan Zona Integritas</li></ol>



<p>IFAS</p>	<p>5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 6. Dukungan Sistem Peradilan berbasis elektronik (e-court)</p>	<p>4. Pelaksanaan Tupoksi yang belum maksimal 5. Pelaksanaan Kode Etik hakim, Panitera dan Jurusita/JSP yang belum maksimal 6. Pelaksanaan Job Description yang belum maksimal</p>
<p><b>OPPORTUNITIES (O)</b></p>	<p><b>STRATEGI SO</b></p>	<p><b>STRATEGI WO</b></p>
<p>1. Adanya Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) 2. Adanya Website Pengadilan Agama Yogyakarta 3. Adanya Tunjangan Kinerja/ Remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja 4. Adanya penerapan e-court sampai dengan e-litigation 5. Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 6. Penggunaan Teknologi Informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi secara optimal</p>	<p>1. Dengan dukungan Sistem berbasis Web/ Desktop (SIPP, 9 Aplikasi Unggulan Badilag) untuk memaksimalkan Pelaksanaan Tupoksi 2. Dengan adanya Tunjangan kinerja/ Remunerasi, Pegawai Pengadilan Agama Yogyakarta harus lebih meningkat dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, APM dan Pembangunan Zona Integritas 3. Penggunaan Teknologi Informasi dalam Pelaksanaan Tupoksi secara maksimal sesuai dengan SOP yang ditetapkan 4. Pemanfaatan Website Pengadilan Agama Yogyakarta dalam Publikasi informasi berkaitan Reformasi Birokrasi, APM dan Pembangunan Zona Integritas 5. Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang didukung oleh Sistem Peradilan berbasis elektronik (e-court) 6. Penerapan e-litigation yang didukung oleh Sistem Peradilan berbasis elektronik (e-court)</p>	<p>1. Adanya Tunjangan Kinerja/ Remunerasi untuk memaksimalkan pelaksanaan Tupoksi 2. Dengan adanya aplikasi SIPP untuk memaksimalkan pelaksanaan Tupoksi 3. Pemanfaatan Website Pengadilan Agama Yogyakarta dalam memberikan informasi terkait Reformasi Birokrasi, APM dan Pembangunan Zona Integritas guna meningkatkan kepedulian pegawai 4. Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sesuai Tupoksi dan Job Descriptionnya 5. Dengan dukungan penggunaan Teknologi Informasi untuk memaksimalkan penerapan kode etik Hakim, Panitera, dan Jurusita/ JSP sehingga meningkatkan kinerja 6. Peningkatan Tunjangan Kinerja/ Remunerasi sebagai penunjang peningkatan komitmen pegawai dalam Pembangunan Zona Integritas 7. Penggunaan Teknologi Informasi secara optimal untuk meningkatkan kompetensi pegawai di bidang fungsional dan kesekretariatan</p>



TREATHS (T)	STRATEGI ST	STRATEGI WT
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterbatasan Anggaran DIPA</li> <li>2. Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan</li> <li>3. Masih adanya pegawai belum peduli terhadap Tupoksinya</li> <li>4. Hasil Kinerja yang kurang maksimal</li> <li>5. Masih kurangnya evaluasi kinerja pegawai</li> <li>6. Kurang pahamnya pegawai akan perkembangan program-program prioritas yang dicanangkan Badilag</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dengan keterbatasan anggaran DIPA Pengadilan Agama Yogyakarta dituntut melaksanakan Reformasi Birokrasi, APM dan Pembangunan Zona Integritas secara maksimal</li> <li>2. Dengan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, APM dan Pembangunan Zona Integritas guna meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan</li> <li>3. Memaksimalkan pelaksanaan SOP guna meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan</li> <li>4. Dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, APM dan Pembangunan Zona Integritas meningkatkan evaluasi kinerja pegawai</li> <li>5. Dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, APM dan Pembangunan Zona Integritas menuntut SDM untuk mengoptimalkan hasil kerjanya</li> <li>6. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis dukungan Sistem berbasis Web/Desktop (SIPP, 9 Aplikasi Unggulan Badilag) untuk meningkatkan pemahaman pegawai terhadap perkembangan program prioritas yang dicanangkan Badilag</li> <li>7. Sosialisasi dan Optimalisasi SOP untuk meningkatkan kepedulian pegawai terhadap Tupoksinya</li> <li>8. Pembangunan PTSP yang optimal dengan memaksimalkan anggaran DIPA</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilaksanakan evaluasi kinerja pegawai untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan</li> <li>2. Optimalisasi jumlah pegawai untuk meningkatkan evaluasi kinerja</li> <li>3. Optimalisasi Tupoksi untuk meningkatkan kepedulian pegawai</li> <li>4. Optimalisasi Tupoksi dan Job Description untuk peningkatan evaluasi kinerja pegawai</li> <li>5. Peningkatan Evaluasi Kinerja Pegawai untuk meningkatkan kepedulian dan komitmen pegawai terhadap Reformasi Birokrasi, APM dan Pembangunan Zona Integritas</li> <li>6. Peningkatan Kompetensi pegawai di bidang fungsional dan kesekretariatan guna menunjang perkembangan program-program prioritas yang dicanangkan Badilag</li> </ol>



	9. Penerapan Sistem Peradilan berbasis elektronik (e-court sampai dengan e-litigation) untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	
--	--	--

Penjelasan :

1. Strategi SO adalah Strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang
2. Strategi WO adalah Strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
3. Strategi ST adalah Strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman
4. Strategi WT adalah Strategi yang meminimalkan kelemahan untuk mengatasi ancaman

Guna mengetahui strategi yang tepat dalam mencapai tujuan Pengadilan Agama Yogyakarta maka diperlukan identifikasi stakeholder atau pemangku kepentingan yang berkaitan erat dengan Pengadilan Agama Yogyakarta. Stakeholder yang berkepentingan dengan Pengadilan Agama Yogyakarta diantaranya sebagai berikut :

No.	Stakeholder	Kebutuhan dan Harapan Pada PA. Yogyakarta
1.	Masyarakat Pencari Keadilan/ Para Pihak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persidangan perkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan</li> <li>- Putusan memenuhi rasa keadilan</li> <li>- Pemberian produk pengadilan tepat waktu</li> </ul>
2.	Mahkamah Agung RI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data perkara yang valid</li> <li>- Kelengkapan pengiriman berkas upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali/ PK</li> </ul>
3.	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (BADILAG)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel</li> </ul>



No.	Stakeholder	Kebutuhan dan Harapan Pada PA. Yogyakarta
4.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan</li> <li>- Meningkatnya pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan secara tepat waktu</li> </ul>
	Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketepatan pengiriman laporan keperkaraan dan kesekretariatan</li> <li>- Kelengkapan pengiriman berkas upaya hukum banding</li> <li>- Peningkatan disiplin pegawai</li> </ul>
5.	Pengadilan Agama Lain	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya kerja sama dalam hal pemenuhan bantuan panggilan/ PBT Tabayun, pelaksanaan sita dan eksekusi secara tepat waktu</li> </ul>
6.	Pos Bantuan Hukum/ Posbakum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permohonan/ Gugatan selesai tepat waktu, benar serta lancarnya proses pengajuan pendaftaran perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta</li> <li>- Membantu atau melayani para pencari keadilan</li> </ul>
7.	Bank	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kerjasama dalam hal pembayaran gaji dan tunjangan pegawai secara tepat waktu</li> <li>- Kesepakatan bersama mengenai tata cara penyetoran panjar biaya perkara</li> </ul>
8.	Kantor Pos	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemudahan masyarakat dalam melakukan legalisasi alat bukti persidangan</li> <li>- Transaksi pengiriman surat dan biaya panggilan melalui Kantor Pos</li> </ul>
9.	Radio Republik Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesepakatan bersama mengenai tata cara pemanggilan pihak dalam perkara perceraian yang tidak diketahui tempat tinggalnya</li> </ul>
10.	Advokat/ Pengacara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persidangan dan penyelesaian perkara tepat waktu dan transparan</li> <li>- Pemberian produk pengadilan tepat waktu</li> <li>- Putusan memenuhi rasa keadilan</li> <li>- Informasi perkara yang dipantau secara cepat dan tepat</li> </ul>



## **BAB. II**

# **VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS**

- VISI DAN MISI
- TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Rencana Strategis Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan – tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penelitian, perbaikan, pengkajian, penelaahan terhadap system kebijakan dan peraturan perundang – undangan untuk mendapat efektifitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Yogyakarta diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) tahun 2020 – 2024 sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program kegiatan pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada Tahun 2020-2024.

## A. VISI DAN MISI

Visi merupakan suatu gambaran mendatang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita atau tujuan hukum yang ingin diwujudkan. Visi Pengadilan Agama Yogyakarta merupakan pandangan ke depan untuk menentukan arah kerja Pengadilan Agama Yogyakarta agar dapat memiliki kemampuan sendiri, bersikap adil, menciptakan pengadilan yang berkualitas dengan pegawai yang memiliki integritas tinggi dan moralitas baik.



Adapun Visi Pengadilan Agama Yogyakarta adalah :

***“Terwujudnya Pengadilan Agama Yogyakarta yang Agung”***



Penjelasan :

1. Pengadilan Agama Yogyakarta menunjukkan Lembaga peradilan di lingkungan peradilan agama sebagai pengadilan tingkan pertama yang berkedudukan di Kota Yogyakarta
2. Kata Agung menunjukkan suatu keadaan yang mempunyai sifat kehormatan, keluhuran dan wibawa serta martabat.

Sedangkan Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Adapun **Misi** Pengadilan Agama Yogyakarta, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan agama sehingga lebih professional dan proporsional
2. Memberikan pelayanan prima guna terwujudnya pelayanan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan
3. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
4. Memberikan dan menyajikan informasi secara transparan, jujur dan akuntabel
5. Meningkatkan citra lembaga peradilan agama sesuai dengan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia

## **B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

**Tujuan** adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Yogyakarta. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Terciptanya kualitas sumber daya aparatur peradilan agama sehingga lebih profesional dan proporsional
2. Terwujudnya pelayanan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan



3. Terciptanya tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
4. Tersedianya informasi yang transparan, jujur dan akuntabel
5. Meningkatnya citra lembaga peradilan agama sesuai dengan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Sasaran** adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Sasaran Strategis/ Kinerja Utama yang hendak dicapai Pengadilan Agama Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
2. Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
3. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan
4. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel
5. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
6. Terlaksananya Administrasi Kesekretariatan yang tertata rapi dan lengkap

Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolok ukur atas keberhasilan Sasaran Strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama dengan digambarkan sebagai berikut :

TUJUAN	SASARAN	
	Kinerja Utama	Indikator
1. Tersedianya informasi yang transparan, jujur dan akuntabel	- Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	- Prosentase sisa perkara yang diselesaikan - Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Prosentase penurunan sisa perkara - Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : a. Banding b. Kasasi c. PK - Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan



TUJUAN	SASARAN	
	Kinerja Utama	Indikator
2. Terwujudnya pelayanan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu</li> <li>- Prosentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi</li> <li>- Prosentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu</li> <li>- Prosentase putusan yang menarik perhatian (ekonomi Syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosentase perkara prodeo (Pembebasan Biaya Perkara) yang diselesaikan</li> <li>- Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum</li> <li>- Prosentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)</li> </ul>
3. Terciptanya tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya Kepatuhan terhadap putusan pengadilan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya administrasi Kesekretariatan yang tertata dan lengkap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosentase ketepatan pelayanan administrasi kepegawaian dalam pembuatan KGB</li> <li>- Prosentase ketepatan pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengusulan kenaikan pangkat</li> <li>- Prosentase ketepatan pelayanan administrasi kepegawaian dalam pembuatan surat cuti pegawai</li> <li>- Prosentase ketepatan penyusunan Laporan Keuangan yang dibuat</li> </ul>



TUJUAN	SASARAN	
	Kinerja Utama	Indikator
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosentase ketepatan penyusunan Laporan BMN yang dibuat</li> <li>- Prosentase ketepatan penyusunan Laporan Tahunan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)</li> <li>- Prosentase ketepatan pengiriman Laporan absensi pegawai</li> <li>- Prosentase penyusunan Rencana Anggaran/ RKA-KL</li> <li>- Prosentase laporan realisasi pelaksanaan anggaran</li> </ul>
4. Terciptanya kualitas sumber daya aparatur peradilan agama sehingga lebih profesional dan proporsional	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosentase Pegawai yang diusulkan diklat teknis</li> <li>- Prosentase pegawai yang diusulkan diklat non teknis</li> <li>- Prosentase pegawai yang mengikuti/ lulus diklat teknis</li> <li>- Prosentase pegawai yang mengikuti/ lulus diklat non teknis</li> </ul>



## **BAB. III**

# **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

- ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
- KERANGKA REGULASI
- KERANGKA KELEMBAGAAN

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, Sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan Makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang

berkualitas dan berdaya saing.

Terdapat 4 pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang diterjemahkan ke dalam 7 agenda



pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas.





## A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Dalam arah kebijakan dan strategi, Mahkamah Agung RI telah menetapkan Visi, yaitu :

*"Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung"*

Visi besar Mahkamah Agung tersebut membutuhkan langkah-langkah konkret sebagai panduan umum yang berfungsi menterjemahkan pesan-pesan yang terkandung dalam visi yang membentuk kinerja terarah, terukur dan dituangkan dalam rumusan Misi Mahkamah Agung. Arah kebijakan Buku Cetak Bru untuk masa 2010-2035 telah menetapkan misi Mahkamah Agung sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kepercayaan masyarakat terhadap system peradilan
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan

Pendekatan kerangka berpikir manajemen peradilan yang unggul, menempatkan terdapat 7 (tujuh) area Peradilan Agung, yaitu :

1. Kepemimpinan dan Manajemen Pengadilan
2. Kebijakan – Kebijakan Pengadilan
3. Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana dan Keuangan
4. Penyelenggaraan Persidangan
5. Kebutuhan dan Kepuasan Pengguna Pengadilan
6. Pelayanan Pengadilan yang terjangkau
7. Kepercayaan dan Keyakinan masyarakat pengguna Pengadilan

Berdasarkan Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 sebagai arah kebijakan dan strategi jangka Panjang Mahkamah Agung RI, telah menetapkan arahan kebijakan dalam beberapa strategi perubahan pada : (1). Fungsi



Peradilan; (2). Manajemen Perkara; (3). Manajemen Sumber Daya Manusia; (4). Manajemen Sumber Daya Keuangan; (5). Manajemen Sarana dan Prasarana; (6) Manajemen Informasi Teknologi; (7). Transparansi Peradilan dan (8). Fungsi Pengawasan dalam rangka upaya yang diharapkan dapat menjadi arah operasional pencapaian Visi dan Misi Mahkamah Agung.

## **B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan Pengadilan Agama Yogyakarta menetapkan arah, kebijakan dan strategi sebagai berikut :

### **1. Peningkatan Kinerja**

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal – hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- a. Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi;
- b. Pengawasan Internal dan Eksternal;
- c. Memahami Job Description;
- d. Menguasai Standar Operating Prosedur (SOP);
- e. Adanya dukungan sarana pasarana dan teknologi informasi yang memadai



## 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

- a. Memiliki standar pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan yang mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggara pelayanan maupun penerima pelayanan;
- b. Memiliki mekanisme penanganan pengaduan;
- c. Memahami Job Description;
- d. Menguasai Standard Operationl Procedur (SOP);
- e. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang Pelayanan Publik dan Pelayanan Prima;
- f. Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik;

## C. KERANGKA REGULASI

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan : “RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/ lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan “.

Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai kawal depan Mahkamah Agung pada RPJM periode ke IV tahun 2020 -2024 yang bertema “**Indonesia Berpenghasilan Menengah - Tinggi yang Sejahtera, Adil dan**



**Berkesinambungan**” oleh pemerintah diberi amanat untuk melaksanakan program pemerintah guna memperkuat Pohukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik meliputi : (1). Reformasi Birokrasi untuk pelayanan public berkualitas; (2). Memperbaiki system peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan; (3). Mempermudah akses terhadap keadilan.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2020-2024 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 1 angka 14 Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor : 1 tahun 2014 107 tentang pedoman Penyusunan RPJMN 2015 -2019 dan Peraturan sesmen PPN/Bappenas tentang juklak Nomor :2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN. Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategik tahun 2020-2024 adalah :

1. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan,
2. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan,
3. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Pengadilan Agama Yogyakarta dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2015 -2019 juga harus menetapkan kerangka regulasi, dimana penetapan kerangka regulasi yang dibuat Pengadilan Agama Yogyakarta akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Pengadilan Agama Yogyakarta serta arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung.

## KERANGKA REGULASI 2020-2024 PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2020-2024	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggung Jawab	Bagian Terkait
<b>1. Peningkatan Penyelesaian Perkara Pengadilan Agama Yogyakarta</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembatasan perkara Gugatan dan Permohonan</li> <li>- Penyederhanaan proses berperkara</li> <li>- Percepatan persidangan</li> <li>- Penguatan akses pada peradilan</li> <li>- Modernisasi manajemen perkara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penguatan organisasi Pengadilan Agama Yogyakarta dibawah Mahkamah Agung</li> <li>- Spesialisasi hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta</li> <li>- Percepatan proses persidangan untuk meminimalisir sisa perkara akhir tahun</li> <li>- Penggunaan SIPP untuk mempermudah manajemen administrasi perkara</li> <li>- Pelaksanaan <i>one stop service/</i> Pelayanan Satu Pintu di Pengadilan Agama Yogyakarta</li> <li>- Implementasi Aplikasi e-court dan e-litigation di Pengadilan Agama Yogyakarta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SK Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta tentang Panjar Biaya Perkara</li> <li>- SK Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta tentang Pembagian Majelis Hakim beserta Panitera Pengganti</li> <li>- SK Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta tentang Tim SIPP</li> <li>- SK Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta tentang Penunjukkan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)</li> </ul>	Panitera	Kepaniteraan PA. Yk

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2020-2024	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggung Jawab	Bagian Terkait
<b>2. Optimalisasi Manajemen Pengadilan Agama Yogyakarta</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan penyelesaian perkara, peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara</li> <li>- Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan</li> <li>- Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan</li> <li>- Penerapan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM)</li> <li>- Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkesinambungan</li> <li>- Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara</li> <li>- Pelaksanaan Posbakum dan perkara prodeo</li> <li>- Peningkatan pelayanan publik</li> <li>- Pemuktahiran data website secara berkala</li> <li>- Implementasi Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) sesuai dengan Standarisasi yang telah ditetapkan BADILAG</li> <li>- Pelaksanan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi</li> <li>- Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Edaran Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta tentang peningkatan pelayanan publik</li> <li>- SK mengenai Standar Pelayanan di Pengadilan Agama Yogyakarta</li> <li>- Mou/ Kerjasama dengan Pihak Ketiga penyelenggaraan Posbakum</li> <li>- Surat Perintah Kerja/ SPK dengan Pihak Ketiga penyelenggara Posbakum</li> <li>- Surat Edaran Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta tentang Tata Cara dan Syarat Pengajuan Perkara Prodeo</li> <li>- SK Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta tentang Tim Pengelola Website Pengadilan Agama Yogyakarta</li> <li>- SK Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta tentang Tim</li> </ul>	Pimpinan	Kepaniteraan PA. Yk Sekretariat PA. Yk

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2020-2024	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggung Jawab	Bagian Terkait
			Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) - SK Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi - SK Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM		
<b>3. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi</li> <li>- Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan tata kelola optimalisasi teknologi informasi</li> <li>- Peningkatan kualitas aparatur Pengadilan Agama Yogyakarta dengan cara menambah volume pelaksanaan DDTK</li> <li>- Peningkatan kompetensi aparatur Pengadilan Agama Yogyakarta dengan cara mengikutsertakan dalam diklat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SK Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta tentang Tim Teknologi Informasi</li> <li>- Jadwal Pelaksanaan/ Realisasi DDTK baik yang bersifat teknis maupun non teknis</li> <li>- Keikutsertaan pegawai dalam diklat baik yang terkait pelayanan publik maupun manajemen perkantoran</li> </ul>	Sekretaris	Kepaniteraan PA. Yk Sekretariat PA. Yk

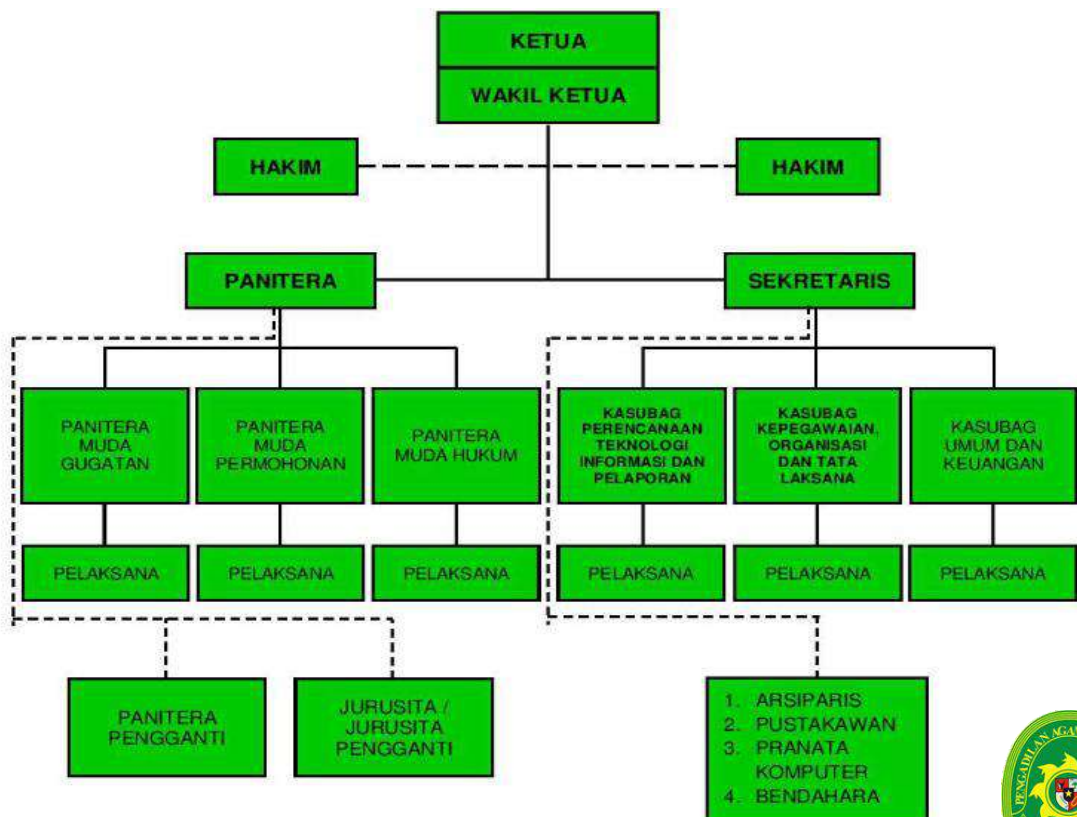
Isu Strategis	Arah Kebijakan 2020-2024	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggung Jawab	Bagian Terkait
<b>4. Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Agama Yogyakarta</b>	Peningkatan Sarana dan Prasarana pendukung kinerja aparatur Pengadilan Agama Yogyakarta	Pembentukan skala prioritas pemenuhan sarana dan prasarana kinerja aparatur Pengadilan Agama Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekapitulasi kebutuhan Sarana dan Prasarana</li> <li>- Rencana Kerja Pengajuan Pengadaan Sarana dan Prasarana</li> <li>- SK Kuasa Pengguna Barang tentang Penunjukkan Pengguna Aset di Pengadilan Agama Yogyakarta</li> </ul>	Sekretaris	Kepaniteraan PA. Yk Sekretariat PA. Yk

#### D. KERANGKA KELEMBAGAAN

Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai salah satu satuan kerja dibawah Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung dengan struktur organisasi yang kuat. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Yogyakarta dilaksanakan oleh Pimpinan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan dibantu oleh Sekretariat dan Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta.

Penyusunan kerangka kelembagaan adalah menyiapkan perangkat struktur organisasi, ketatalaksanaan dan pengaturan mengenai pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pengadilan Agama Yogyakarta dalam rangka melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun, tata kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Pengadilan Agama telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tersebut, dibentuklah Susunan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai berikut :





# **BAB. IV**

# **TARGET KINERJA**

# **DAN**

# **KERANGKA PENDANAAN**



Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Agama Yogyakarta memiliki 3 program sesuai dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang akan dilaksanakan, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sasaran Program	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan</b>	Meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM	37 orang	38 orang	41 orang	42 orang	45 orang
	Meningkatnya pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya kualitas manajemen rencana program dan anggaran serta organisasi secara transparan, efektifitas dan efisien	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok
	Meningkatnya pengelolaan Sarana dan Prasarana untuk menunjang pelayanan peradilan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan

2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sasaran Program	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Terpenuhinya kebutuhan Sarana dan Prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan</b>	Sarana Prasarana Pendukung Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan e-court	-	5 unit	7 unit	9 unit	9 unit
	Peralatan/ Fasilitas Perkantoran Penunjang Kinerja	12 unit	20 unit	20 unit	20 unit	24 unit



3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Sasaran Program	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, transparan dan akuntabel	Perkara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	25 pkr	25 pkr	25 pkr	25 pkr	30 pkr
	Jam Layanan Pos Layanan Hukum	480 JL	500JL	625 JL	860JL	1680 JL

KERANGKA PENDANAAN 2020-2024

Program	Indikasi Pendanaan (Rp.)				
	2020	2021	2022	2023	2024
1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI	11.513.515.000	11.513.515.000	11.245.704.000	11.245.704.000	11.245.704.000
2. Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI	25.000.000	215.000.000	508.000.000	311.000.000	1.500.000.000
3. Peningkatan Manajemen Peradilan	71.150.000	74.750.000	74.750.000	74.750.000	74.750.000



# **BAB. V**

# **PENUTUP**



Rencana Strategis Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2020 – 2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis baik yang bersifat internal maupun eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik lemah, peluang, tantangan, program yang ditetapkan dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan.

Rencana Strategis Pengadilan Agama Yogyakarta akan terus disempurnakan dari waktu ke waktu, dengan demikian rencana strategis ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan, dengan rencana strategis ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Rencana Strategis ini pula diharapkan unit – unit kerja di lingkungan Pengadilan Agama Yogyakarta memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu tahun 2020 – 2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Yogyakarta dapat terwujud dengan baik.





# LAMPIRAN



## MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN : 2020 – 2024

**Instansi** : Pengadilan Agama Yogyakarta

**VISI** : Terwujudnya Pengadilan Agama Yogyakarta yang agung

- MISI** :
1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan agama sehingga lebih profesional dan proporsional
  2. Memberikan pelayanan prima guna terwujudnya pelayanan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan
  3. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
  4. Memberikan dan menyajikan informasi secara transparan, jujur dan akuntabel
  5. Meningkatkan citra lembaga peradilan agama sesuai dengan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia

No	Tujuan			Sasaran						Strategi					
	Uraian	Indikator Kinerja	Target	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Rp.
1.	Tersedianya informasi yang transparan, jujur, akuntabel	Prosentase penyampaian informasi kepada masyarakat dan atau pihak berperkara	100%	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan	Penyelesaian sisa perkara	Jumlah penyelesaian sisa perkara	151 pkr	
					b. Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	90%	90%	90%	90%		Penyelesaian perkara dengan tepat waktu	Jumlah penyelesaian perkara tepat waktu	933 pkr	
					c. Prosentase penurunan sisa perkara	10%	10%	10%	10%	10%		Penyelesaian sisa perkara	Jumlah sisa perkara yang diselesaikan	151 pkr	

No	Tujuan			Sasaran						Strategi					
	Uraian	Indikator Kinerja	Target	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Rp.
					d. Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	98%	98%	98%	98%	98%		Penyelesaian perkara sesuai ketentuan	Jumlah perkara yang tidak diajukan upaya hukum baik banding, kasasi, maupun PK	914 pkr	
					e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90	90	90	90	90		Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat	Jumlah nilai indeks kepuasan masyarakat	90	
2.	Terwujudnya pelayanan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan	Prosentase Penyelesaian Perkara sesuai dengan prosedur pengadilan	100%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Prosentase putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	90%	90%	90%	90%	90%		Penyampaian Salinan Putusan	Jumlah Salinan putusan yang disampaikan pada para pihak	933 pkr	
					b. Prosentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	15%	15%	15%	15%	15%		Pelaksanaan mediasi melalui mediator	Jumlah perkara yang dimediasi	30 pkr	
					c. Prosentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK yang diajukan secara	100%	100%	100%	100%	100%		Pemberkasan dan pengiriman berkas banding, kasasi dan PK	Jumlah berkas banding, kasasi dan PK yan dikirim tepat waktu	30 pkr	

No	Tujuan			Sasaran						Strategi					
	Uraian	Indikator Kinerja	Target	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Rp.
					lengkap dan tepat waktu										
					d. Prosentase putusan yang menarik perhatian (ekonomi Syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	100%	100%	100%	100%		Pelaksanaan upload putusan yang menarik perhatian (Ekonomi Syariah)	Jumlah amar putusan yang diupload ke website/ direktori putusan MA	8 pkr	
			Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Prosentase perkara prodeo (Pembebasan Biaya Pekara) yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%		Perkara prodeo yang diselesaikan	Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan	25 pkr		
				b. Prosentase perkara permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%	100%	100%	100%	100%		Perkara yang ditangani tentang identitas hukum	Jumlah perkara yang ditangani tentang identitas hukum	2 pkr		
				c. Prosentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum	100%	100%	100%	100%	100%		Perkara yang mendapat layanan dari Pos Layanan Hukum	Jumlah perkara yang dilayani melalui Pos Layanan Hukum	666 pkr		

No	Tujuan			Sasaran						Strategi						
	Uraian	Indikator Kinerja	Target	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Rp.	
3.	Terciptanya tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisiensi	Prosentase kelengkapan administrasi dan manajemen peradilan	100%	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Prosentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	95%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%		Penyelesaian perkara yang harus eksekusi	Jumlah perkara permohonan eksekusi	886 pkr		
				Terlaksananya administrasi kesekretariatan yang tertata dan lengkap	a. Prosentase ketepatan pelayanan administrasi kepegawaian dalam pembuatan KGB	15 keg	15 keg	15 keg	15 keg	15 keg	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembuatan KGB Pegawai	Jumlah pegawai yang dibuatkan KGB	15 org		
					b. Prosentase ketepatan pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengusulan kenaikan pangkat	8 keg	8 keg	8 keg	8 keg	8 keg			Pengumpulan berkas persyaratan pengusulan kenaikan pangkat dan mengirimkannya ke PTA	Jumlah berkas pengusulan kenaikan pangkat yang lengkap dan telah dikirim	8 dok	
					c. Prosentase ketepatan pelayanan kepegawaian dalam pembuatan surat cuti pegawai	50 keg	50 keg	50 keg	50 keg	50 keg			Pembuatan surat cuti pegawai	Jumlah surat cuti pegawai yang dibuat	50 surat	

No	Tujuan			Sasaran						Strategi					
	Uraian	Indikator Kinerja	Target	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Rp.
					d. Prosentase ketepatan penyusunan Laporan Keuangan yang dibuat	100%	100%	100%	100%	100%		Pembuatan dan Penyusunan serta Pengiriman Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan yang telah dikirim	100%	
					e. Prosentase ketepatan penyusunan Laporan BMN yang dibuat	100%	100%	100%	100%	100%		Pembuatan dan Penyusunan serta Pengiriman Laporan BMN	Jumlah Laporan BMN yang telah dikirim	100%	
					f. Prosentase ketepatan penyusunan Laporan Tahunan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	100%	100%	100%	100%	100%		Pembuatan dan penyusunan serta Pengiriman Laporan Tahunan dan LKjIP	Jumlah Laporan Tahunan dan LKjIP yang dikirim	100%	
					g. Prosentase ketepatan pengiriman laporan absensi pegawai	100%	100%	100%	100%	100%		Pengiriman laporan absensi pegawai ke PTA	Jumlah Laporan absensi yang dikirim	100%	
					h. Prosentase penyusunan Rencana Anggaran/ RKA-KL	100%	100%	100%	100%	100%		Pembuatan, Penyusunan dan Pengiriman	Jumlah berkas usulan RKA-KL lengkap yang dikirimkan pada PTA	100%	

No	Tujuan			Sasaran						Strategi					
	Uraian	Indikator Kinerja	Target	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Rp.
												Rencana Anggaran			
					i. Prosentase Laporan Realisasi pelaksanaan Anggaran	100%	100%	100%	100%	100%		Pembuatan Laporan Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Realisasi Anggaran yang dibuat	100%	
4.	Terciptanya kualitas sumberdaya aparatur peradilan agama sehingga lebih profesional dan proporsional	Prosentase sumber daya aparatur pengadilan agama yang berkompeten	100%	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	a. Prosentase Pegawai yang diusulkan diklat teknis	10%	10%	10%	10%	10%		Mengusulkan dan menugaskan Pegawai untuk mengikuti diklat teknis	Jumlah Pegawai yang diusulkan mengikuti diklat teknis	10%	
					b. Prosentase Pegawai yang diusulkan diklat non teknis	10%	10%	10%	10%	10%		Mengusulkan dan menugaskan Pegawai untuk mengikuti diklat non teknis	Jumlah pegawai yang diusulkan mengikuti diklat non teknis	10%	
					c. Prosentase Pegawai yang mengikuti/ lulus diklat teknis	100%	100%	100%	100%	100%		Penerimaan kembali pegawai setelah diklat teknis	Jumlah pegawai yang lulus diklat teknis	100%	
					d. Prosentase pegawai yang mengikuti/ lulus diklat non teknis	100%	100%	100%	100%	100%		Penerimaan kembali pegawai setelah diklat non teknis	Jumlah pegawai yang lulus diklat non teknis	100%	



## MATRIK PENDANAAN TAHUN : 2020 – 2024

Program	Indikasi Pendanaan (Rp.)				
	2020	2021	2022	2023	2024
1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI	11.513.515.000	11.513.515.000	11.245.704.000	11.245.704.000	11.245.704.000
2. Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI	25.000.000	215.000.000	508.000.000	311.000.000	1.500.000.000
3. Peningkatan Manajemen Peradilan	71.150.000	74.750.000	74.750.000	74.750.000	74.750.000